



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2019-2020
Reses Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat secara virtual dan tatap muka
Dengan	: <ol style="list-style-type: none">1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;2. Menteri Kesehatan RI;3. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);4. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;5. Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 11 Juni 2020
Pukul	: 13.00 WIB – selesai
Acara	: Penjelasan mengenai implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama dalam hal : <ol style="list-style-type: none">1. Penanggulangan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan;2. Perbaikan Tata Kelola Sistem Layanan Kesehatan dengan mengedepankan prinsip ekuitas termasuk dalam hal menjamin manfaat pemeliharaan kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan kelas standar.

Ketua Rapat	: Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lt.1 Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. 41 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, beserta jajaran; C. Menteri Kesehatan RI : Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad.(K), beserta jajaran. D. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) : Tubagus Achmad Choesni, beserta jajaran; E. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan : dr. Chairul Radjab Nasution, M.Kes., beserta jajaran; F. Direktur Utama BPJS Kesehatan : Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 13.45 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Demi terciptanya ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sehat dan berkesinambungan sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945, UU SJSN, dan UU BPJS, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk:
 - a. mempercepat perbaikan tata kelola sistem JKN dengan mempertimbangkan rekomendasi BPKP dalam Laporan Hasil Audit atas Aset Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020, dan
 - b. melakukan kajian formulasi baru terkait model pembiayaan (termasuk iuran kepesertaan) dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan kajian terkait kebijakan pembiayaan yang tepat dan adil bagi peserta PBU dan BP Kelas III mandiri.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewas BPJS Kesehatan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan untuk mempercepat kajian manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Standar, termasuk kesiapan tempat tidur (TT) kelas III dan kelas II di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), demi keberlangsungan program JKN.
4. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah meformulasikan kebijakan agar tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) menjadi peserta BPJS Kesehatan.
5. Komisi IX DPR RI akan meminta Pimpinan DPR RI untuk mengundang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja (Raker) untuk membahas permasalahan dan solusi jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan program JKN yang sehat dan berkelanjutan.
6. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan dan DJSN untuk membentuk tim kecil yang beranggotakan BPJS Kesehatan, DJSN, dan unsur serikat pekerja yang bertugas melakukan evaluasi dan perbaikan kepesertaan terutama tentang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
7. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan anggota pada rapat hari ini untuk disampaikan kepada Komisi IX DPR RI paling lambat Senin, 22 Juni 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.15 WIB.

Jakarta, 11 Juni 2020

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
A-331